

Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Capaian Sustainable Development Goals (SDGs)

(The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Achievement of Sustainable Development Goals [SDGs])

Muhammad Habibi¹, Dyah Anugrah Pratama²

¹ Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Bawaslu RI;

² Dokter Klinik Kimia Farma Mutiara Cawang

Email Correspondence: muhammad.habibi@bawaslu.go.id

Abstract

This study aims to analyze the impact of COVID-19 on the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. The sustainable development goals represent a global plan of action, approved by world leaders, intended to end poverty, reduce social inequality, and protect environment. These SDGs consist of 17 goals and 169 targets that are scheduled to be achieved by 2030, and Indonesia began implementing them in 2015. The method used in this study was a bibliometric and descriptive evaluative analysis, wherein data was collected by using the Publish or Perish application, and then processed with VOSviewer application software. Four indicators needed to be scrutinized, namely; (1) the socio-economic impact of COVID-19; (2) the impact of COVID-19 on sustainable development goals; (3) the new normal for the achievement of the SDGs; and (4) the financing of SDGs in a post-COVID period. The results of the study show that the socio-economic impact of the COVID-19 pandemic greatly influences SDGs. Cost is a crucial factor as pandemic's cost is huge, and by all means has a direct impact on SGD efforts. To realize SDGs by 2030 would require governments around the world to improvise in dealing with it, and indeed implement a new normal in governance processes.

Keywords: COVID-19; Pandemic Impact; SDGs achievement

Pendahuluan

Negara-negara di seluruh dunia bersaing dalam hal seberapa bisa mereka menjadi maju. Kecenderungan ini terutama terjadi di negara-negara berkembang dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai pembangunan dilakukan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam skala besar. Di satu sisi, keadaan ini sangat berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, perhatian terhadap pilar sosial dan lingkungan hidup selama ini menjadi kurang memadai. Kesenjangan sosial berskala besar dan kerusakan signifikan pada alam telah mengakibatkan

kurangnya perhatian terhadap konservasi ekologis dan keberlanjutan dalam proses pembangunan. Kekhawatiran ini telah mengarah pada pembentukan gagasan Sustainable Development Goals (SDGs).

SDGs dimaksudkan untuk menyeimbangkan proses pembangunan dengan berfokus pada apa yang disebut dengan Triple E (*Economy, Equality, and Ecology*). Hal ini dikarenakan masyarakat global saat ini sudah mulai lebih memperhatikan perlunya keseimbangan dalam hal tersebut. Banyak yang menganggap bahwa, diambilnya tindakan yang tidak tepat dalam pembangunan, maka kehidupan manusia akan punah. Paradigma yang direpresentasikan oleh SDGs tidak sepenuhnya baru karena pada dasarnya ini merupakan bentuk revisi dari paradigma Millennium Development Goals (MDGs).

Gambar 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sumber: (International NGO Forum on Indonesian Development, 2017)

Revisi ini telah meningkatkan jumlah target yang ingin dicapai dari 67 (dalam MDGs) menjadi 169 untuk SDGs. Dalam hal pelaksanaan MDGs, Indonesia mencapai 49 dari 67 yang ditetapkan (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2010). Namun, terdapat tiga tujuan dari delapan masih di bawah target seperti (a) meningkatkan kesehatan ibu (b) memerangi HIV/AIDS dan tuberkulosis dan (c) memastikan kelestarian lingkungan (Kementerian Kesehatan, 2020). Masih ada pekerjaan rumah besar dalam pencapaian MDGs bagi Indonesia.

Tujuan SDGs antara lain untuk mengentaskan kemiskinan, membangun inklusi sosial ekonomi dan melindungi lingkungan (United Nations, 1992). Walaupun banyak juga kritik terhadap SDGs karena dianggap terlalu ambisius, universal, ekspansif dan berpotensi inkonsisten, terutama antara pembangunan sosial-ekonomi dan tujuan keberlanjutan lingkungan (Redclift, 2005; Stern, Common, & Barbier, 1996). Selain itu SDGs menghadapi tantangan besar pada 30 Januari 2020, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah virus corona baru (2019-nCoV) sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat yang Menjadi Perhatian Internasional (PHEIC). Pemerintah Indonesia pada 2 Maret 2020 mengumumkan kasus pertama yang terjadi (Ihsanuddin, 2020). Melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, Indonesia membentuk

Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, yang bertugas memantau dan meninjau wabah secara global, mengevaluasi risiko penyebaran, dan mempercepat penanganan wabah.

Serangan global pandemi COVID-19 masih terus berlanjut, dunia dihadapkan dengan ketidakpastian, sektor ekonomi global mengalami perlambatan (Syarifuddin, Budiman, & Purwaningsih, 2021). Masih belum pasti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghentikan penyebaran pandemi dan dunia pulih seperti semula. Di tengah situasi yang ada, kesehatan telah menjadi agenda utama semua negara, negara dituntut mampu menyediakan dan meningkatkan fasilitas kesehatan serta mampu merespons dengan cepat. Para ahli mengatakan, sampai solusi medis berupa vaksin untuk COVID-19 mampu mencapai kekebalan kelompok, masalah kesehatan akan tetap menjadi prioritas utama pemerintah (Aulia, Mustari, & Hartaman, 2021).

Krisis kesehatan sekarang dengan cepat berubah menjadi krisis ekonomi karena pembatasan pergerakan orang yang belum pernah terjadi sebelumnya serta kegiatan ekonomi dalam bentuk karantina wilayah di seluruh dunia. Walaupun telah ditemukan vaksin oleh para ahli medis untuk pandemi namun menjaga jarak masih menjadi anjuran untuk melawan virus. Akibatnya kita telah melihat karantina wilayah di seluruh dunia, dan tentu saja itu memiliki dampak negatif yang serius pada kegiatan ekonomi di seluruh dunia. Oleh karena itu, debat paralel adalah tentang: Bagaimana 'menyembuhkan' ekonomi dunia yang sudah 'terinfeksi' COVID-19. Meskipun negara-negara dibuka kembali secara perlahan dengan hati-hati, pembatasan dalam berbagai tingkat diperkirakan akan diberlakukan untuk beberapa waktu yang lebih lama dan berdampak pada pencapaian SDGs.

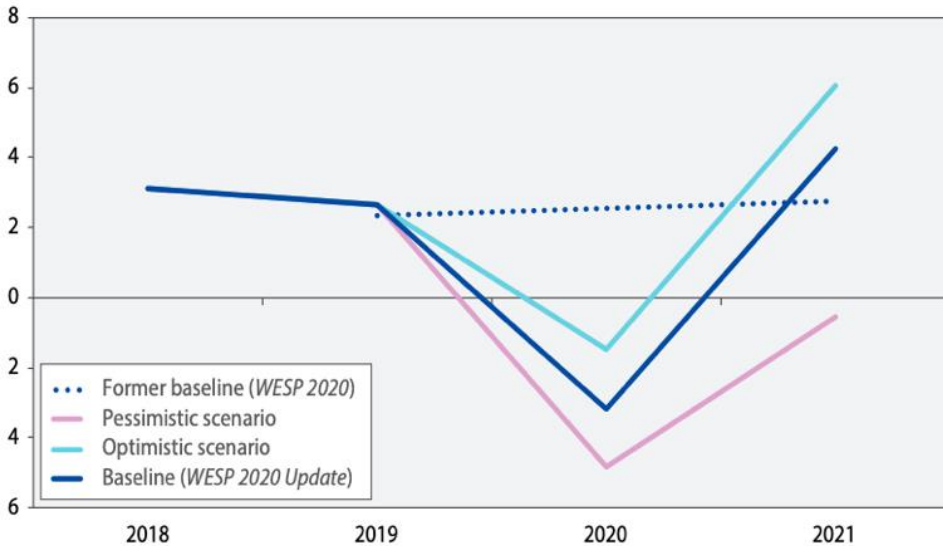
SDGs ditetapkan pada tanggal 25 September 2015, yang terdiri dari 17 tujuan global dan menetapkan 169 target. SDGs diusulkan sebagai pedoman kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan sehingga tujuan tersebut dapat dicapai pada tahun 2030 (Yuan, 2021). Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia telah menyetujui SDGs sebagai paradigma baru untuk pembangunan. Namun, paradigma ini memang membutuhkan perubahan pola pikir dan perilaku yang berkaitan dengan pembangunan ditambah tantangan COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan yang dimaksudkan untuk membantu pencapaian SDGs di Indonesia (Mutiarani & Siswantoro, 2020). Namun, tidak ada peraturan yang mewajibkan untuk mencapai target spesifik SDGs bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Metode Penelitian

Kajian ini dilakukan menggunakan metode analisis bibliometrik dan deskriptif evaluatif. Populasi kajian adalah data primer artikel jurnal sejak tahun 2015-2021 yang diambil dari hasil penelusuran yang dilakukan pada bulan Agustus 2021 melalui basis data Google Scholar memanfaatkan aplikasi Publis or Peris dengan "abstract keyword" SDGs dan Covid-19; basis data yang diperoleh adalah 1000 artikel, data tersebut diexport dengan format Research Information Systems (RIS).

tahun sebelumnya. Perdagangan dunia bisa turun sebanyak 15 persen pada tahun 2020 karena penurunan tajam dalam permintaan global dan gangguan dalam rantai pasokan global yang sudah mapan (United Nations, 2020b).

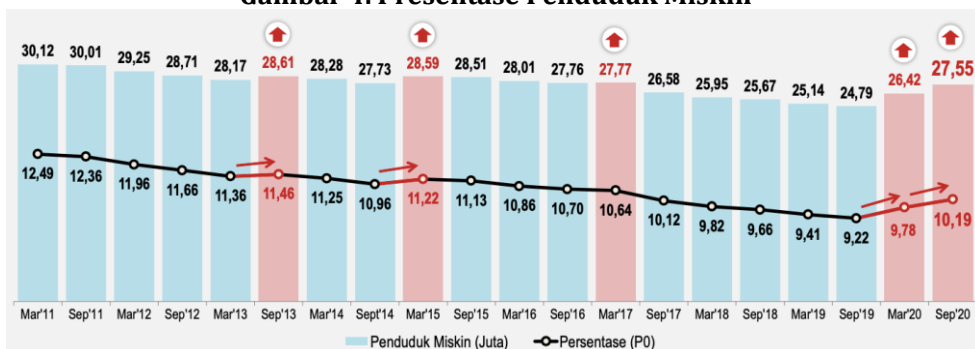
Gambar 3. Skenario Pertumbuhan Global 2020-2021



Sumber: United Nations, (2020)

Kondisi di Indonesia menunjukan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami kontraksi pada tahun 2020 triwulan I 2,97, triwulan II -5,32, triwulan III -3,49 dan pada triwulan IV 2020 menunjukkan berlanjutnya proses perbaikan perekonomian namun dengan kondisi tetap pada posisi minus yaitu -2,19 (Bank Indonesia, 2020). Semua ini tergantung dari durasi karantina wilayah di seluruh dunia dan pembatasan kegiatan ekonomi, kehilangan output dapat semakin memburuk.

Gambar 4. Presentase Penduduk Miskin

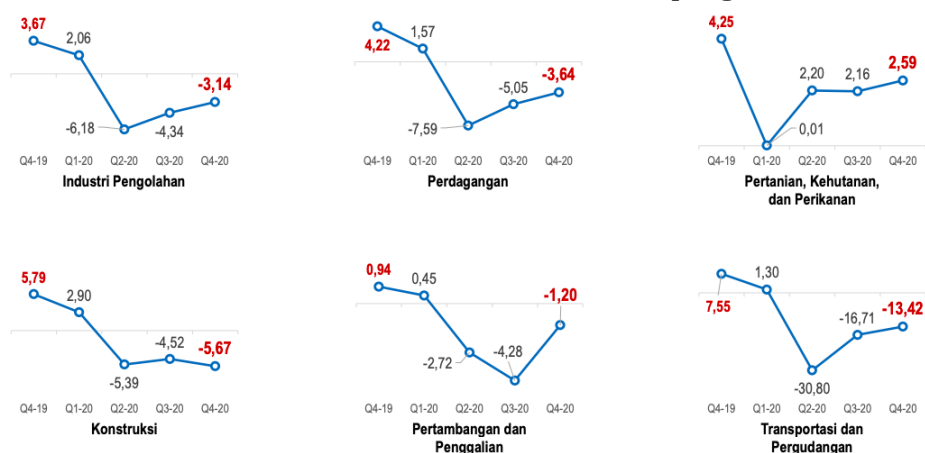


Sumber: Badan Pusat Statistik, (2020b)

Analisis Bank Dunia berpandangan bahwa pada skala guncangan ekonomi, COVID-19 akan mendorong sekitar 40–60 juta orang ke dalam kemiskinan

ekstrem, dengan perkiraan terbaik adalah 49 juta orang. Dalam skenario terburuk, kemiskinan global pada tahun 2020 dapat turun kembali ke level tahun 2017, menghilangkan kemajuan tiga tahun terakhir dalam memerangi kemiskinan ekstrem (Mahler, Lakner, Aguilar, & Wu, 2020). Survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan tingkat kemiskinan di Indonesia bertumbuh (lihat gambar 4) pada kuartal Maret 2020 9,78 persen dan naik lagi pada September 2020 menjadi 10,19 persen (Badan Pusat Statistik, 2020b). Tingkat kemiskinan ini sama lebih tinggi dari September 2017 hal ini memperlihatkan kemajuan untuk memberantas kemiskinan melalui berbagai program yang dilakukan pemerintah selama tiga tahun terakhir tidak berarti dengan adanya pandemi ini.

Gambar 5. Petumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha



Sumber: Badan Pusat Statistik, (2020c)

Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat bahwa sudah 170 negara telah penyusutan menghadapi PDB per kapita dan bahkan wabah yang berumur pendek akan menyebabkan kontraksi Produk Domestik Bruto (PDB) 3,0 persen secara global. Meskipun kehancuran akibat pandemi ini diperkirakan akan mereda pada tahun 2020 tidak terbukti, dan malah memunculkan varian baru COVID-19 pada tahun 2021 dapat berdampak lebih buruk pada perekonomian dunia (Winck, 2020). Kondisi perekonomian Indonesia tercatat mengalami penurunan sebesar 2,07 persen, dengan PDB menurut lapangan usaha (y to y) yang juga mengalami penurunan disemua sektor unggulan seperti industri, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan (Badan Pusat Statistik, 2020a).

Ini hanya kutipan dari beberapa kejadian hingga saat ini. Bergantung pada skenario yang berkembang dalam beberapa hari mendatang, mungkin ada kejadian baru. Namun, seperti yang ada sekarang, semua kejadian ini cukup untuk memahami bahwa kemajuan yang dibuat pada tahun-tahun sebelumnya dalam mengatasi kemiskinan, kelaparan, ketidaksetaraan, kesehatan yang baik, dan kesejahteraan akan merosot secara substansial dan mungkin menghadapi kemunduran serius dalam beberapa bulan atau tahun mendatang.

Kami telah melihat tindakan cepat di seluruh dunia di bidang ekonomi yang sebagian besar dipusatkan pada langkah-langkah kesejahteraan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang paling rentan, memastikan jaring pengaman sosial, dan mendeklarasikan paket stimulus. Dorongan utama dari perencanaan telah mengembalikan ekonomi ke jalurnya mungkin dengan mengatasi masalah pertumbuhan, kemiskinan dan ketidaksetaraan, penciptaan lapangan kerja, bisnis, perdagangan dan investasi, dll.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Seperti yang disepakati pada Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan atau Rio+20 (Rio de Janeiro, Juni 2012), 'Agenda 2030' yang biasa dikenal sebagai 'SDGs' diadopsi pada September 2015 oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah lebih dari tiga tahun proses negosiasi antar pemerintah tentang Agenda Pembangunan Pasca-2015. Kerangka hasil pembangunan pasca-MDG yang disebut 'Transforming Our World: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan' ini menampilkan 17 tujuan dan 169 target yang saling terkait, yang disebut sebagai SDGs PBB, yang pada dasarnya merupakan penerus MDGs, dengan bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sekaligus melindungi lingkungan selama 15 tahun ke depan (2016-2030).

Sebelumnya, MDGs ditetapkan pada tahun 2000, sebagai agenda pembangunan dunia yang terdiri dari delapan (8) sasaran, ditujukan untuk memerangi kemiskinan, untuk periode 2000-2015. Sementara MDGs diutamakan untuk negara-negara berkembang dan tujuan pembangunan yang berpusat pada kemiskinan, SDGs muncul secara universal, berlaku untuk semua negara di dunia dengan memperhitungkan semua aspek/pilar pembangunan misalnya, sosial, ekonomi dan lingkungan. Sebanyak 193 negara telah dengan suara bulat berkomitmen untuk mematuhi dan melaksanakan SDGs selama 15 tahun hingga tahun 2030. Ke-17 tujuan tersebut dapat dilihat dalam gambar dibawah:

Meskipun tujuan-tujuan ini sering dianggap sebagai penerus MDGs, SDGs pada dasarnya berbeda dari MDGs dalam arti bahwa tujuan-tujuan ini sangat kuat, saling terkait, berdasarkan kerangka tiga pilar keberlanjutan (Ekonomi, Sosial dan Lingkungan). Tujuan-tujuan baru ini dibangun di atas prinsip-prinsip inti: 'tidak meninggalkan siapa pun di belakang', 'inklusivitas' dan 'kemitraan multi-stakeholder', yang menekankan pendekatan holistik untuk mencapai pembangunan berkelanjutan untuk semua.

Dampak COVID-19 pada SDGs

Sementara pada tahun-tahun ini sejak tahun 2015, dunia telah melihat beberapa kemajuan yang baik dalam hal keberhasilan pencapaian SDGs, pandemi ini jelas akan berdampak buruk pada momentum pencapaian. Mungkin tidak ada hasil penelitian yang cukup konkret tentang dampak pasti COVID-19 pada SDGs, namun, kemungkinan dampak COVID-19 pada SDGs bisa menghasilkan tiga dampak yaitu:

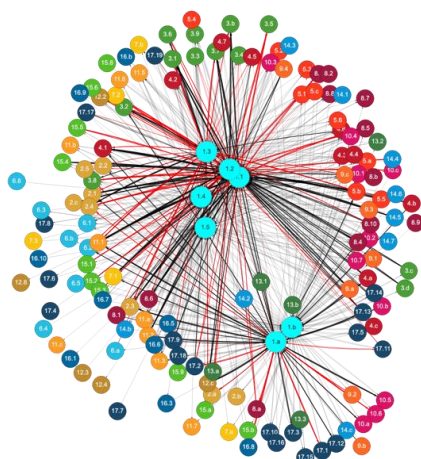
Pertama, ini akan menghapus beberapa pencapaian baik yang dibuat sejauh ini (2016-2020) terhadap beberapa tujuan yang terkena dampak langsung;

Kedua, akan memperlambat kemajuan beberapa tujuan lain dalam beberapa bulan mendatang karena pengaturan ulang prioritas; dan

Ketiga, sumber daya akan diprioritaskan untuk sektor penanganan pandemi.

Semua ini dapat menyebabkan keterlambatan pencapaian SDGs; beberapa analis bahkan memperkirakan evaluasi ulang timeline untuk mencapai SDGs. COVID-19 telah menunjukkan bagaimana tantangan global bersama dapat memiliki dampak yang berbeda di berbagai negara/kawasan berdasarkan realitas sosial ekonomi mereka. Negara-negara yang negara ekonomi kurang maju (Inggris: *Less Economically Developed Country*, disingkat LEDC) dan negara berkembang, negara-negara kepulauan kecil, Asia Selatan dan Afrika sub-Sahara kemungkinan paling menderita. Dari mereka, orang miskin dan kelas menengah akan terpukul dengan keras. Kelompok marginal—perempuan, migran, pekerja informal berketerampilan rendah dan berupah rendah adalah yang paling menderita. Tidak diragukan lagi, COVID-19 telah menjadi pukulan besar bagi pencapaian tujuan SDGs: 'inklusivitas' dan 'tidak meninggalkan siapa pun'.

Gambar 6. Visualisasi Keterkaitan SDGs dan Indikator Ditetapkan Indonesia



Sumber: Xin Zhou, Moinuddin, & Li, (2021)

Visualisasi keterkaitan SDGs memperlihatkan keterkaitan antara target tujuan pembangunan berkelanjutan dan data tingkat indikator yang telah ditetapkan oleh Indonesia (lihat Gambar 6). Pada tahun 2017 proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan internasional (%) untuk Indonesia berada pada posisi 5.70 meningkat dari tahun 2016 sebesar 0.8. Jika berkaca pada laporan BPS (lihat Gambar 4) terjadi kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada pertumbuhan penduduk miskin.

Dari 17 tujuan SDGs, dampaknya dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu: eksplisit dan implisit. Sasaran yang paling mungkin terkena dampak secara eksplisit adalah: Tujuan 1: Tidak Ada Kemiskinan; Tujuan 2: Nol Kelaparan; Tujuan 3: Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik; Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas; Tujuan 8: Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; Tujuan 10: Mengurangi Ketimpangan; dan Tujuan 12: Konsumsi dan

Produksi yang Bertanggung Jawab. Berbagai prakiraan yang dikutip dalam para-2 merupakan indikasi yang jelas untuk itu.

Beberapa tujuan mungkin menderita secara implisit karena perbedaan dalam prioritas mengingat bobot ekstra yang perlu diberikan pada sektor kesehatan. Ini adalah: Tujuan 5: Kesetaraan Gender; Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi; Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau; Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Tujuan 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan; Tujuan 13: Aksi Iklim; Tujuan 14: Kehidupan di Bawah Air; Tujuan 15: Kehidupan di Darat; Tujuan 16: Kedamaian dan Keadilan Institusi yang Kuat. Pembatasan kegiatan ekonomi di seluruh dunia dapat menyebabkan beberapa pencapaian positif, sehingga membuat beberapa perbaikan terkait dengan tujuan SDG no 13, 14 dan 15. Namun, mungkin ini tidak cukup untuk mengkompensasi dampak keseluruhan secara substansial. Untuk tujuan 17 ketercapiannya terganung dari 16 tujuan lainnya.

Pembiayaan SDGs pada Periode COVID-19

Pembiayaan selalu menjadi perhatian utama untuk pelaksanaan setiap agenda pembangunan, dalam SDGs hal ini tidak terkecuali. Sebuah perkiraan menyebutkan bahwa bahkan sebelum pandemi global saat ini dimulai, kesenjangan pembiayaan untuk mencapai SDGs pada tahun 2030 adalah US\$2,5 triliun per tahun (Runde, Metzger, & Abdullah, 2020). Tidak diragukan lagi, COVID-19 menciptakan tekanan tambahan dan menambah kesenjangan pembiayaan yang ada karena negara-negara menghadapi krisis keuangan pada periode pasca-COVID. Sekali lagi, sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pertanian, dll. akan membutuhkan alokasi yang lebih besar, ini berarti sektor-sektor lain yang sama pentingnya akan tertinggal.

Banyak hal akan tergantung pada bagaimana tantangan terkait dengan sumber pembiayaan pembangunan yang potensial, misalnya, aliran investasi asing langsung, pengiriman uang, bantuan luar negeri dan bantuan pembangunan resmi, tabungan, dapat diatasi selama perlambatan ekonomi. Semua ini akan membutuhkan upaya berlipat ganda dan pendekatan inovatif oleh pemerintah di seluruh dunia untuk mencari sumber dana baru, selain dari sumber tradisional untuk mencapai SDGs tepat waktu.

Tabel 1. Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Menurut Kelompok Peminjam (dalam Juta USD)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Pemerintah dan Bank Sentral / Government and Central Bank	142.698	158.283	189.622	196.275	202.872	207.764	202.829	193.755	192.437	194.861	199.286	201.770	202.956	209.168	202.622	206.526	209.246	213.631
1.1 Pemerintah / Government	137.286	154.875	177.318	183.187	189.876	204.963	200.111	188.953	189.713	192.136	196.532	198.877	200.160	197.376	199.808	203.696	206.375	210.763
1.2 Bank Sentral / Central Bank	5.212	3.408	2.304	3.078	2.996	2.801	2.717	2.802	2.721	2.725	2.754	2.793	2.816	2.794	2.814	2.829	2.871	2.868
2. Swasta / Private	168.123	161.722	171.847	189.155	200.099	202.547	203.633	204.852	207.832	208.669	209.195	207.942	209.866	208.398	210.587	209.736	208.487	207.585
2.1 Lembaga Keuangan / Financial Corporations	42.997	40.062	40.563	44.933	46.636	46.956	47.176	47.571	47.907	48.799	48.624	48.087	48.061	45.808	45.812	46.026	44.622	44.853
2.1.1 Bank / Bank	31.928	30.247	30.309	34.367	35.243	35.643	35.328	35.853	36.123	36.867	37.023	36.818	36.839	35.918	36.601	36.323	34.894	35.811
2.1.1.1 LKBN / Nonbank Financial Corporations	11.077	9.815	10.263	10.586	11.391	11.494	11.646	11.758	11.763	11.932	11.481	11.249	11.203	11.090	11.211	11.783	10.328	10.459
2.2 Badan Lembaga Keuangan / Nonfinancial Corporations	125.125	121.661	131.284	144.202	154.054	155.611	156.459	157.281	159.126	161.870	162.771	161.875	161.805	163.309	164.775	163.711	164.605	161.712
TOTAL (1+2)	310.820	320.005	361.469	385.429	402.971	410.311	406.463	398.607	399.669	403.520	408.481	409.712	412.862	408.566	417.209	416.262	417.759	421.214

Sumber: Bank Indonesia, (2021)

Indonesia mengalami kondisi pembiayaan SGD yang sulit, hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah pinjaman luar negeri setiap tahunnya baik itu dari

sektor pemerintah maupun dari sektor swasta. Laporan Bank Indonesia menyebut terjadi kenaikan jumlah utang pemerintah lebih dari USD 6.499 juta dari 2019 ke 2020 (lihat tabel 1), jumlah yang sedemikian besar ini guna menutupi defisit APBN yang terus membesar selama pandemi COVID-19 (Bank Indonesia, 2021).

Kementerian Keuangan menyebut struktur Anggaran Pemerintah Pusat (ABPP) penggunaannya diprioritaskan untuk percepatan penanganan COVID-19 serta dampak yang ditimbulkannya, antara lain ancaman yang dapat membahayakan kondisi ekonomi nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan fokus pembelanjaan anggaran untuk belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian (Kementerian Keuangan, 2020). Selain itu, untuk Anggaran Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), pemerintah memutuskan bahwa Anggaran Dana Desa digunakan sebagai dana jaring pengaman sosial di Desa berupa bantuan langsung kepada warga miskin dan kegiatan penanganan wabah COVID-19 (Kementerian Keuangan, 2020).

Normal Baru dan Masa Depan SDGs dalam Kondisi Pandemi COVID-19

Jadi, apa pelajaran utama kita dari pandemi ini dan bagaimana kita melanjutkan tujuan dari pembangunan berkelanjutan?

Pertama dan terpenting, dunia harus mengambil pelajaran dari krisis ini dan membayangkan membangun masyarakat yang lebih tangguh dan kuat untuk mampu menyerap guncangan eksternal semacam itu di masa depan sehingga tidak ada lagi halangan untuk pencapaian Agenda 2030 (SDGs).

Kedua: Pengkajian dan penelitian yang mendalam tentang seberapa jauh pandemi akan mempengaruhi pencapaian SDGs dalam jangka pendek, menengah, dan panjang serta diperlukan perumusan *roadmap* pemulihan yang jelas.

Ketiga: 'Tanggung jawab bersama', 'solidaritas global' dan 'bertindak bersama' harus menjadi prinsip dasar untuk menanggapi tantangan sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh COVID-19, dan dunia harus belajar dari krisis kemanusiaan ini untuk 'membangun kembali dengan lebih baik', yang diidentifikasi dengan tepat oleh PBB dalam laporan terbarunya tentang dampak COVID-19 (United Nations, 2020a).

Keempat: Mendefinisikan ulang peran pemangku kepentingan yang berbeda dalam 'New Normal': tanggung jawab harus diperluas dari pemerintah ke komunitas internasional, organisasi multilateral, sektor swasta, masyarakat sipil dan bahkan individu, jika kita ingin melakukan pendekatan yang efektif dan perjuangan yang berarti melawan pandemi dan pengaruhnya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kelima: COVID-19 telah menunjukkan bagaimana pendekatan kemanusiaan dan filantropi skala kecil di tingkat mikro dapat berdampak besar dalam memerangi tantangan di masa-masa sulit, terutama dalam hal mobilisasi sumber daya. Kita perlu menerjemahkan semangat yang sama dalam pendekatan kita untuk mencapai SDGs pada periode pasca-COVID.

Keenam: Sesuai dengan prinsip inti SDGs, dunia harus terus memberikan perhatian khusus pada segmen masyarakat yang paling marjinal dan rentan untuk memastikan 'tidak ada yang tertinggal'.

Prinsip yang mendasari setiap keputusan ekonomi adalah setiap orang akan mengambil keputusan yang akan memaksimalkan kepuasan atau utilitas pribadi seseorang dan keputusan akan dibuat dengan dasar yang rasional; dengan kata lain, menunjukkan bahwa keputusan akan dibuat oleh manusia sepenuhnya berdasarkan 'kepentingan pribadi', dan tidak dipandu oleh 'emosi' dan 'peduli terhadap orang lain'. Manusia harus tidak hanya peduli pada kepentingannya sendiri, tetapi juga kesejahteraan orang lain; mereka bisa 'tidak mementingkan diri sendiri', mereka bisa 'bertanggung jawab'!

Saat kita secara bertahap bergerak maju dan menyesuaikan dengan 'New Normal' di masa pasca-COVID, kita juga harus mendefinisikan normal baru sebagai 'bertanggung jawab' untuk mencapai SDGs dalam jangka waktu. 'Perubahan perilaku dalam skala global' akan sangat penting untuk efek ini. Sementara kita menjaga jarak secara fisik, kita harus menghubungkan kembali pikiran kita dan bertindak bersama.

Kesimpulan

Tahun 2021 bisa menjadi tahun yang menentukan dalam melakukan nominalisasi dampak sosial dan ekonomi dari pandemi COVID-19. Biaya menjadi faktor yang krusial, pandemi menyedot biaya yang besar, ini berdampak secara langsung dalam pencapaian SDGs. Pemerintah di seluruh dunia harus berimprovisasi dan menerapkan normal baru dalam proses pengelolaan pemerintahan untuk mewujudkan SDGs 2030. Satu hal yang telah kita lihat melalui pandemi ini adalah bahwa negara dan masyarakat sekarang tampaknya lebih terhubung daripada sebelumnya dalam perjuangan bersama melawan tantangan global bersama. Kita dapat memanfaatkan kesatuan baru ini, kita perlu melakukan 'Tujuan-17: Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan', untuk merumuskan kembali strategi kita dalam partisipasi dengan semua pemangku kepentingan, misalnya, pemerintah, komunitas internasional, organisasi multilateral, sektor swasta, masyarakat sipil, individu, dan para filantropi untuk mewujudkan SDGs 2030. Selain fokus pada penguatan sektor kesehatan dan menghidupkan kembali ekonomi di masa pandemi, kita tidak boleh mengalihkan pandangan dari komitmen kami untuk pencapaian SDGs.

References

- Aulia, N. R., Mustari, N., & Hartaman, N. (2021). Dinamika Kebijakan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid-19 Di Kota Tarakan. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(1), 16–25. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i1.1045>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2010). *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2014*. Jakarta. Retrieved from https://www.bappenas.go.id/files/8613/5229/8462/1-laporan-pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-indonesia-2010201011181321170_20101223204310_2813_0.pdf
- Badan Pusat Statistik. (2020a). Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c). Retrieved from [bps.go.id website: https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c.html](https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c.html)

- Badan Pusat Statistik. (2020b). Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen. Retrieved from bps.go.id website: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>
- Badan Pusat Statistik. (2020c). Pertumbuhan Ekonomi Q4-2019 s.d. Q4-2020 (Y-on-Y) Menurut Lapangan Usaha. Retrieved from bps.go.id website: https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210205095341.pdf
- Bank Indonesia. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2020 Melanjutkan Perbaikan. Retrieved from Bank Indonesia website: <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Infografis-Pertumbuhan-Ekonomi-Indonesia-Triwulan-IV-2020.pdf>
- Bank Indonesia. (2021). External Debt Statistics of Indonesia - April 2021. Retrieved from bi.go.id website: <https://www.bi.go.id/en/statistik/ekonomi-keuangan/sulni/Pages/SULNI-April-2021.aspx>
- Eck, N. J. van, & Waltman, L. (2021). VOSviewer Manual. Netherlands. Retrieved from http://www.vosviewer.com/documentation/Manual_VOSviewer_1.6.1.pdf
- Ihsanuddin. (2020). Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia. Retrieved from nasional.kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>
- International NGO Forum on Indonesian Development. (2017). Masyarakat Sipil Indonesia & Pemerintah Dorong Percepatan Pembangunan Berkelanjutan.
- Kementerian Kesehatan. (2020). Posisi Pencapaian MDG'S di Indonesia. Retrieved from Kementerian Kesehatan website: https://kespel.kemkes.go.id/news/news_public/detail/37
- Kementerian Keuangan. (2020). Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 di Masa Pandemi Covid-19. Retrieved from anggaran.kemenkeu.go.id website: <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perubahan-postur-dan-rincian-apbn-2020-di-masa-pandemi-covid-19>
- Mahler, D. G., Lakner, C., Aguilar, R. A. C., & Wu, H. (2020). The Impact of COVID-19 (Coronavirus) on Global Poverty: Why Sub-Saharan Africa Might be the Region Hardest Hit.
- Mutiarani, N. D., & Siswanto, D. (2020). The Impact of Local Government Characteristics on the Accomplishment of Sustainable Development Goals (SDGs). *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1847751>
- Redclift, M. (2005). Sustainable Development (1987–2005): An Oxymoron Comes of Age. *Sustainable Development*, 13(4), 212–227. Retrieved from <http://www.homepages.ucl.ac.uk/~ucessjb/S3> Reading/redclift 2005.pdf

- Runde, D. F., Metzger, C., & Abdullah, H. F. (2020). Covid-19 Demands Innovative Ideas for Financing the SDGs. In *Center for Strategic & International Studies Briefs*. Washington, D.C. Retrieved from <https://www.csis.org/analysis/covid-19-demands-innovative-ideas-financing-sdgs>
- Stern, D. I., Common, M. S., & Barbier, E. B. (1996). Economic Growth and Environmental Degradation: The Environmental Kuznets Curve and Sustainable Development. *World Development*, 24(7), 1151–1160. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(96\)00032-0](https://doi.org/10.1016/0305-750X(96)00032-0)
- Syarifuddin, T. I., Budiman, & Purwaningsih, T. (2021). Regional Head Communication Patterns on Social Media in Handling the Covid-19 Pandemic. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 717(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012020>
- United Nations. (1992). *Agenda 21*. Rio de Janeiro. Retrieved from <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf>
- United Nations. (2020a). *Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the Socio-economic Impacts of COVID-19*. New York. Retrieved from https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
- United Nations. (2020b). *World Economic Situation and Prospects as of mid-2021*. New York. Retrieved from https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/WESP2020_MYU_Report.pdf
- Winck, B. (2020). The IMF Says its Forecast for the COVID-19 Recession Might Now be too Optimistic. Retrieved from weforum.org website: <https://www.weforum.org/agenda/2020/04/imf-economy-coronavirus-covid-19-recession/>
- Xin Zhou, Moinuddin, M., & Li, Y. (2021). *SDG Interlinkages Analysis & Visualisation Tool (V4.0)*. Kanagawa. Retrieved from <https://sdginterlinkages.iges.jp/index.html>
- Yuan, M. (2021). Geographical Information Science for the United Nations' 2030 Agenda for Sustainable Development. *International Journal of Geographical Information Science*, 35(1), 1–8. <https://doi.org/10.1080/13658816.2020.1766244>